

**PENGATURAN LEMBAGA PENGAKUAN ANAK SEBAGAI WUJUD
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK LUAR KAWIN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ANDREAS SATYA WARDHANA

NIM. 125010100111054



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM
MALANG
2016**




HALAMAN PENGESAHAN**PENGATURAN LEMBAGA PENGAKUAN ANAK SEBAGAI WUJUD
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK LUAR KAWIN**

Oleh:

**ANDREAS SATYA WARDHANA
125010100111054**Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: **17 OCT 2018**

Ketua Majelis Penguji

Anggota

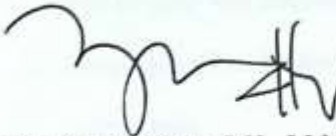

Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., SU
NIP. 19500526 198002 2 001
Rachmi Sulistyorini, S.H., M.H.
NIP. 19611112 198601 2 001

Anggota

Anggota


Warkum Sumitro, S.H., M.H.
NIP. 19560222198403 1002
Siti Hamidah, S.H., M.H.
NIP. 19660622199002 2 001Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Budi Santoso, S.H., LLM.
NIP. 19720622 200501 1 002
Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.
NIP. 19620805198802 1 001



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGATURAN LEMBAGA PENGAKUAN ANAK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK LUAR KAWIN**

Identitas Penulis :
a. Nama : **Andreas Satya Wardhana**

b. NIM : **125010100111054**


Konsentrasi : **Hukum Keperdataan**

Jangka Waktu Penelitian : **5 Bulan**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U.

NIP. 19500526 198002 2 001


Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LLM

NIP. 19790728 200502 2 001


Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata


Dr. Budi Santoso, S.H., LLM

NIP. 19720622 200501 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena hanya berkat kasih dan karuniaNya penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaturan Lembaga Pengakan Anak Sebagai Wujud Perlindungan Bagi Anak Luar Kawin”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Strata (S-1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mengalami banyak kendala yang dihadapi. Namun, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Banyak pihak yang telah berperan dalam memberikan motivasi dan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa’at, S. H., M. Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Budi Santoso, S. H., LLM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
3. Ibu Prof. Dr. Suhariningsih, S. H., S. U. selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan saran-saran yang telah diberikan
4. Ibu Ratih Dheviana Puru HT, S. H., LLM selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan motivasinya
5. Bapak Evaristus Budiarjo selaku bapak dari penulis atas semangat dan motivasinya

6. Ibu Wayan Oka Udiani selaku ibu dari penulis atas motivasi, perhatian dan doa-doanya
7. Pihak-pihak lain yang membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

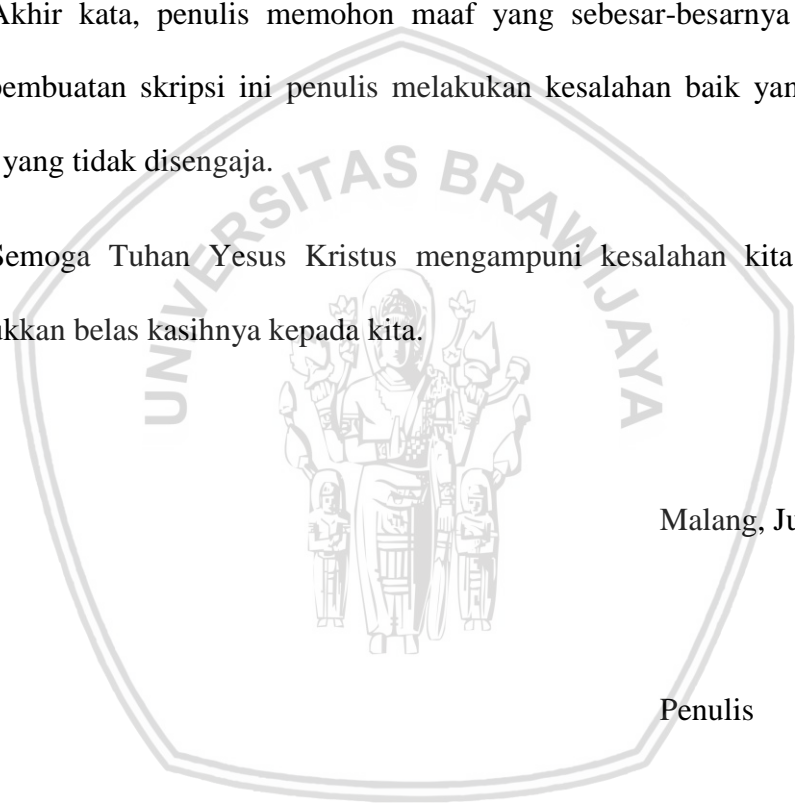
Penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu diharapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yesus Kristus mengampuni kesalahan kita dan selalu menunjukkan belas kasihnya kepada kita.

Malang, Juli 2016

Penulis



RINGKASAN

Andreas Satya Wardhana, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2016, PENGATURAN LEMBAGA PENGAKUAN ANAK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK LUAR KAWIN, Prof. Dr. Suhariningsih, S. H., LLM, Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LLM

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pengaturan Lembaga Pengakuan Anak Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya menyatakan bahwa anak luar memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki yang diketahui sebagai ayah biologisnya selama bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang biasa dikenal dengan tes DNA. Namun hingga saat ini belum ada peraturan pelaksana tentang bagaimana pembuktian tersebut dilakukan. Meski demikian tes DNA bukanlah merupakan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Perbuatan yang menimbulkan hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya adalah pengakuan anak luar kawin. Namun, pengaturan anak luar kawin yang diatur dalam BW pada zaman Kolonial Belanda berlaku bagi golongan penduduk Eropa saja.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka karya tulis ini mengangkat rumusan masalah apakah lembaga pengakuan anak luar kawin yang diatur dalam BW dapat dipergunakan oleh semua golongan penduduk di Indonesia yang membutuhkan lembaga pengakuan anak luar kawin sebagai bentuk perlindungan hukum dan memberikan kepastian hukum? Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan lembaga anak luar kawin yang ada di dalam BW dapat diterapkan bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia sebagai alternatif untuk menanggapi keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sehingga diharapkan dengan begitu timbul kepastian hukum mengenai hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya sekaligus memunculkan timbulnya kewajiban hukum si ayah untuk memenuhi hak-hak anak sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan historis yang dihubungkan dengan peraturan

repository.ub.ac.id

perundang-undangan. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknis analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan pengakuan anak luar kawin yang terdapat di dalam BW dapat dipergunakan dan diberlakukan bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia yang membutuhkan pengaturan tersebut demi terciptanya kepastian hukum mengenai hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya sehingga timbul perlindungan hak-hak anak bagi anak luar kawin.

SUMMARY

Andreas Satya Wardhana, Civil law, Faculty of Law University of Brawijaya, July 2016, REGULATION OF AGENCIES FOR CHILDREN RECOGNITION AS A FORM OF LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN OUTSIDE OF MARRIAGE, Prof. Dr. Suhariningsih, S. H., LLM, Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LLM

In this thesis, the writer raised the issue in the Regulation of Agencies for Children Recognition As a Form of Legal Protection for Children Outside of Marriage. The selection of the theme was motivated by the issuance of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VIII / 2010 which basically states that a child outside of civil case relationship with a man known as his biological father as long as can be proven by science and technology commonly known as DNA testing. But until now there is no implementation of regulations on how such evidence can be done. However the DNA test is not a legal act which may give rise to civil cases relationship between the children outside marriage with his biological father. Acts that give rise to the legal relationship between the children outside marriage with his biological father is the recognition of a child outside marriage. However, outside marriage arrangements for their children regulated in BW at the time of Dutch colonial applies for class of European residents only.

Based on the above matter, the paper raises the issue of whether agency for children child recognition outside marriage regulated in BW can be used by all segments of the population in Indonesia that requires acknowledgment institutions of children outside marriage as a form of legal protection and provide legal certainty? The study aims to determine whether a child outside marriage institutional arrangements existing in the BW can apply to an entire segment of the population in Indonesia as an alternative to respond to the release of the decision of the Constitutional Court. So it is expected that it would give rise to civil legal certainty regarding the relationship between the children outside marriage with his biological father at the same time led to the emergence of a legal obligation of the father to fulfill the rights of children as a form of legal protection for children.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

In this study the writer was using normative legal research with a historical approach associated with the legislation. Legal materials obtained will be analyzed using qualitative analysis technique.

Results from this study is the recognition arrangements of children outside marriage contained in BW can be used and applied to the entire segment of the population in Indonesia requiring such arrangements in order to create legal certainty regarding the legal relationship between the child outside of marriage with his biological father which raised the protection of children's rights for children outside of marriage.



DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	Error! Bookmark not defined.
Halaman Pengesahan.....	Error! Bookmark not defined.
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	12
Ringkasan	viii
Summary.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5 Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Umum Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
2.2 Kajian Umum Tujuan Hukum	Error! Bookmark not defined.
2.3 Kajian Sifat Pengaturan Hukum Perdata.....	Error! Bookmark not defined.
2.4 Kajian Umum Kedudukan Anak	Error! Bookmark not defined.
2.5 Kedudukan Anak Luar Kawin	Error! Bookmark not defined.
2.6 Pengakuan dan Pengesahan Anak	Error! Bookmark not defined.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.2 Metode Pendekatan.....	Error! Bookmark not defined.
3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
3.6 Definisi Konseptual	Error! Bookmark not defined.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Kawin	Error! Bookmark not defined.
4.2 Pengakuan Anak Luar Kawin Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	Error! Bookmark not defined.
4.3 Dasar Hukum yang Digunakan Untuk Melakukan Pengakuan Anak Luar Kawin Dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau <i>Burgerlijk Wetboek (BW)</i> dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Error! Bookmark not defined.
4.4 Pengaturan Pengakuan Anak Luar Kawin sebagai Wujud Perlindungan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
4.5 Pengaturan Pengakuan Anak Luar Kawin sebagai Wujud Kepastian Hukum	Error! Bookmark not defined.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
5.2 Saran	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.1 Perbandingan Perlindungan Hukum Tentang Pendidikan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.2 Perbandingan Perlindungan Hukum Tentang Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak	Error! Bookmark not defined.







BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum.¹ Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki konsekuensi bahwa setiap orang warga negara memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Sebagai suatu negara hukum, Negara Indonesia wajib melindungi dan menjamin setiap warga negaranya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Yang termasuk warga negara Indonesia adalah setiap orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara.

Masyarakat Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini terdiri dari bermacam-macam suku bangsa yang tunduk pada hukumnya masing-masing oleh karena itu diadakan suatu pembagian golongan penduduk. Menurut pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) golongan penduduk ada tiga yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing dan golongan Bumi Putera. Ketiga golongan penduduk tersebut juga tunduk pada hukum yang berlainan pula, golongan Eropa tunduk pada *Burgelijk Wetboek*, golongan Timur Asing dan golongan Bumi Putera tunduk pada hukum adatnya masing-masing. Dengan begitu timbullah pluralisme hukum di Indonesia yang melindungi dan menjamin hak dan kewajiban masing-masing warga negara.

Anak adalah bagian dari warga negara yang dilindungi dan dijamin hak-hak dan kewajibannya oleh Undang-Undang Dasar sebagaimana tertulis dalam

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pasal 28B. Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dengan sepenuh hati dan dididik dengan benar karena di tangan anak masa depan Bangsa Indonesia diserahkan. Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua, sebagai hasil dari hubungan pria dan wanita.² Pengertian anak menunjukkan adanya bapak dan ibu dari anak itu, dalam arti bahwa sebagai hasil dari seorang pria dan seorang wanita, maka wanita tersebut melahirkan manusia lain yang dapat menyatakan bahwa seorang pria adalah ayahnya dan seorang wanita adalah ibunya.³

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam pasal 28B ayat (2) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari bunyi pasal di atas maka kita dapat secara umum mengartikan bahwa setiap orang tua menjamin kelangsungan hidup anaknya. Kelangsungan hidup tidak hanya berarti makan sehari-hari, tetapi juga masalah pendidikan, sandang, hiburan juga warisan jikalau memungkinkan.

Dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan demikian “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” maka jika kita cermati terdapat dua golongan anak, yaitu anak sah dan anak luar kawin.⁴ Anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diartikan sebagai anak yang lahir diluar perkawinan kecuali anak yang dibenihkan dalam keadaan zinah atau sumbang.⁵

² Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, hlm. 38

³ Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Sumur Bandung, Bandung, 1984, hlm. 72

⁴ Pasal 42 **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

⁵ Pasal 272 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak zinah adalah anak yang lahir dari perempuan dan laki-laki yang salah satu atau

Anak luar kawin, menurut pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sebaliknya anak luar kawin tidak memiliki hubungan apapun dengan ayah biologisnya.

Meskipun statusnya adalah anak luar kawin, namun anak luar kawin ini tetap harus mendapatkan hak-haknya sebagai anak, misalnya hak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan hak lainnya seperti yang tertulis dalam konstitusi.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah ketika ada anak luar kawin yang oleh ayah biologisnya tidak diakui sebagai anaknya, maka implikasinya adalah si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja⁶. Padahal tidak semua ibu dapat secara mampu untuk memberikan kelangsungan hidup bagi anaknya, tentu saja ada ibu yang kekurangan dalam memberikan pengasuhan dan pemeliharaan kepada anaknya seorang diri karena ayah si anak tidak mengakui anaknya. Hal ini tentu mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional⁷ anak seperti yang tercantum dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga si anak mengalami kerugian yang luar biasa padahal anak luar kawin juga menjadi subyek dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bisa jadi si anak putus sekolah dan terancam kehilangan masa depan yang cerah karena si ibu tidak sanggup membiayai pendidikannya lagi.

keduanya sudah terikat perkawinan, sedangkan anak sumbang adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan sedarah.

⁶ Soedharyo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 41

⁷ Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Pada masa Orde Baru sudah ada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan yaitu yang meliputi hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, hak atas pelayanan, hak atas perlindungan lingkungan hidup, hak mendapat pertolongan pertama, hak memperoleh asuhan, hak memperoleh bantuan, hak diberi pelayanan dan asuhan, hak memperoleh pelayanan khusus, dan hak mendapatkan bantuan dan pelayanan. Namun karena tidak adanya pengakuan dari ayah biologisnya menyebabkan hak-hak atas anak sebagaimana di atas terancam tidak bisa dinikmati oleh si anak.⁸ Hak-hak anak di atas termasuk dalam hak alimentasi yaitu hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan sekaligus menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhi hak alimentasi anak. Pada masa sekarangpun telah dibentuk Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disempurnakan melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Meskipun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang melindungi hak-hak anak luar kawin, namun putusan tersebut tidak serta merta dapat mengubah status anak luar kawin menjadi anak yang diakui meskipun ayah luar kawin dari si anak telah melakukan tes DNA yang hasilnya membuktikan bahwa ia adalah ayah dari anak luar kawin tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas juga tidak serta merta dapat menjamin pemenuhan hak-hak keperdataan anak.

Menurut pendapat Dirga Insanu dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” berpandangan bahwa ketentuan pasal 43 Undang-undang Perkawinan tidak lagi

⁸ Darwan Prinst, **Hukum Anak Indonesia**, PT Citra Aditnya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 80

mengikat setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi terhadap pasal 43 Undang-undang Perkawinan yang dilakukan oleh Machica Mochtar.⁹ Tetapi penulis berpendapat lain, putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta merta juga berlaku dan mengubah isi atau materi dari undang-undang yang menjadi obyek uji materi, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus ditanggapi oleh pembentuk undang-undang dengan memperbaiki materi undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya baru akan timbul ketika si ayah melakukan perbuatan hukum yaitu pengakuan. Namun pengakuan anak luar kawin ini dikecualikan bagi anak zinah dan anak sumbang. Dalam pasal 43 Undang-undang Perkawinan tidak dikenal lembaga pengakuan anak, hanya menyebutkan kedudukan hukum anak luar kawin saja.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak ada pengaturan tentang lembaga pengakuan anak, maka aturan yang mungkin bisa diterapkan dalam melakukan pengakuan anak adalah aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yaitu dalam pasal 280-289. Dengan pengakuan inilah maka akan timbul hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Padahal aturan dalam *Burgerlijk Wetboek* pada masa lampau diperuntukkan bagi penduduk golongan Eropa atau yang dipersamakan dengan golongan Eropa sedangkan untuk golongan bumi putera dan timur asing menggunakan hukum adatnya masing-masing, dengan penggolongan penduduk seperti di atas maka apakah aturan tentang pengakuan anak yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* dapat dipergunakan untuk semua golongan penduduk?

⁹ Dirga Insanu Lamaluta, **Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**, 2013, Skripsi

Padahal menurut aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal I menyatakan bahwa semua peraturan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD, salah satu aturan yang belum dibuat baru yaitu adalah tentang penggolongan penduduk pasal 131 dan 163 *IS*.

Maka dari itu penulis berpendapat diperlukan suatu penelitian segera yang mengkaji pengakuan anak luar kawin dari sudut pandang BW dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan supaya kita dapat mengetahui bagaimana pandangan hukum positif tentang lembaga pengakuan anak luar kawin.

Dari penjabaran diatas maka penulis akan membuat penelitian yang berjudul **“Pengaturan Lembaga Pengakuan Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin”**.

Di bawah ini peneliti akan menggambarkan bagaimana penelitian terdahulu yang berkaitan pengakuan anak luar kawin, sehingga bisa terlihat perbedaan antara penelitian yang satu dengan yang lainnya.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Identitas Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2006	Emilda Kuspraningrum	Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kedudukan anak luar kawin dalam perspektif hukum positif di Indonesia? 2. Sejauh mana perlindungan anak luar kawin dalam perspektif hukum positif di Indonesia? 	<p>Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan anak luar kawin dalam perspektif hukum positif di Indonesia serta sampai sejauh mana perlindungan hak-hak anak luar kawin dalam perspektif yang sama. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, anak luar kawin tidak memiliki ikatan hukum ataupun biologis dengan laki-laki yang menjadi ayahnya. Sedangkan setelah ada pengakuan terhadap anak luar kawin dari kedua orang tuanya baru muncul suatu talian kekeluargaan beserta segala akibat-akibat terutama dalam hak mewaris antara anak dengan orang tua yang mengakuinya.</p>
2	2013	Dirga Insanu Lamaluta	Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana hak dan kedudukan anak luar kawin pascaputusan Mahkamah Konstitusi? 2. Bagaimana pengakuan terhadap anak luar kawin pascaputusan Mahkamah Konstitusi? 	<p>Penelitian ini mengkaji kedudukan dan pengakuan anak luar kawin setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Menurut pasal 208 KUHPerdara, dengan melakukan perbuatan pengakuan maka akan timbul hubungan anak luar kawin dengan ayahnya. Pascaputusan Mahkamah Konstitusi, laki-laki yang menjadi ayah biologis anak luar kawin juga dibebankan tanggung jawab dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak luar</p>

					kawin.
3	2010	Yessy Gunawan	Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak Karena Perkawinan Menyusul Berdasarkan Pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dikaitkan dengan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak luar kawin yang mana saja yang dapat dicatat oleh kantor catatan sipil berdasarkan pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan? 2. Apakah tetap dipakainya ketentuan BW sebagai dasar hukum dalam melakukan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin terututma oleh ayah sudah tepat? Dan tidak bertentangan dengan pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? 	<p>Penelitian ini mengkaji tentang pencatatan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin berdasarkan pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dikaitkan dengan pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.</p> <p>Dalam penelitian ini saudari Yessy Gunawan memfokuskan kajiannya pada macam anak luar kawin yang dapat diakui dan disahkan karena terdapat perbedaan anak luar kawin yang dapat diakui dan disahkan antara yang diatur dalam BW dan yang diatur dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan, serta mengkaji dasar hukum pelaksanaan pengakuan dan pengesahan anak yang terdapat dalam BW apakah dapat diberlakukan guna mengisi kekosongan hukum pada peraturan pelaksanaan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin.</p>

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memberikan arahan pembahasan yang jelas dalam penulisan ini maka penulis mengemukakan beberapa hal yang menjadi permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

Apakah lembaga pengakuan anak terhadap anak luar kawin yang diatur dalam BW dapat digunakan oleh semua golongan penduduk di Indonesia yang membutuhkan lembaga pengakuan terhadap anak luar kawin sebagai bentuk perlindungan hukum dan memberikan kepastian hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui lembaga pengakuan anak terhadap anak luar kawin yang diatur dalam BW dapat digunakan oleh semua golongan penduduk yang membutuhkan lembaga pengakuan terhadap anak luar kawin sebagai bentuk perlindungan hukum dan memberikan kepastian hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan keilmuan khususnya di bidang ilmu hukum keluarga yang terkait dengan pentingnya pengakuan anak luar kawin dari sudut pandang BW dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan anak luar kawin yang menuntut pemenuhan hak-hak keperdataan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi aparat penegak hukum

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam menciptakan suatu keadilan dan kepastian hukum mengenai pentingnya pengakuan anak luar kawin dari sudut pandang BW dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mempermudah aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan hukum dapat kembali ke tujuan awalnya.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengakuan anak luar kawin dari sudut pandang BW dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wacana baru bagi masyarakat terkait dengan pengakuan anak luar kawin dari sudut pandang BW dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga masyarakat yang mengalami kasus serupa tahu apa langkah-langkah dan upaya hukum yang harus ditempuh.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan uraian sistematis, hal tersebut sangat berguna untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan mengkaji permasalahan yang

diangkat dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, masalah yang melatar belakangi ditulisnya skripsi ini beserta tujuan dan manfaat penulisannya. Adapun lebih rincinya sebagai berikut:

1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian

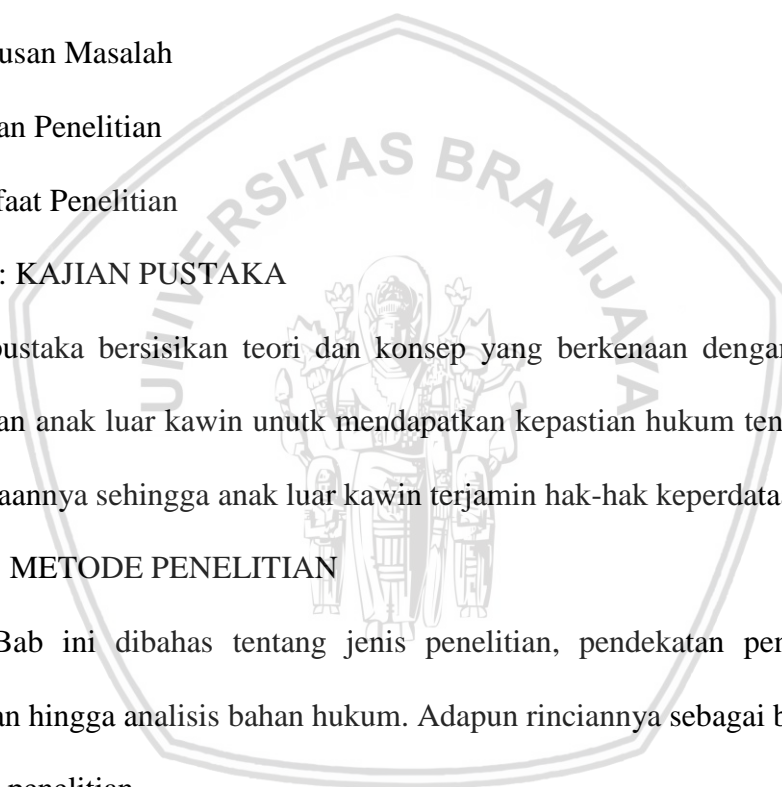
BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka bersisikan teori dan konsep yang berkenaan dengan pentingnya pengakuan anak luar kawin untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hak-hak keperdataannya sehingga anak luar kawin terjamin hak-hak keperdataannya.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini dibahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan hingga analisis bahan hukum. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Jenis penelitian
2. Jenis pendekatan
3. Jenis dan sumber bahan hukum
4. Teknik penelusuran bahan hukum
5. Teknik analisis bahan hukum
6. Definisi konseptual

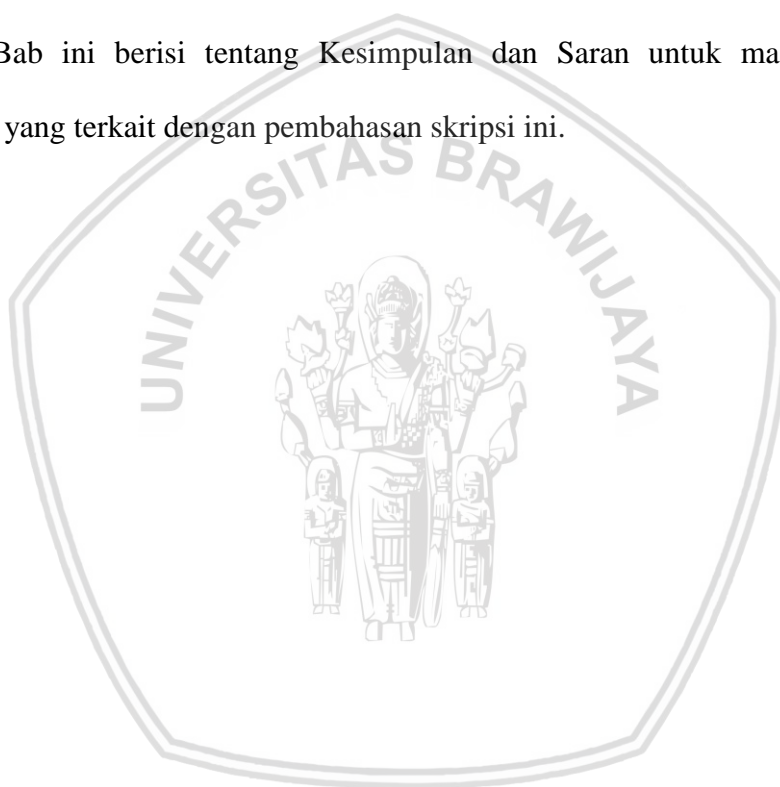


BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi tentang hasil dan analisis terkait analisa tentang pengakuan anak luar kawin dari sudut pandang BW dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menganalisis dasar hukum yang berkaitan dengan hak-hak anak yang harus dipenuhi sebagai tanggung jawab orang tua serta berbagai peraturan hukum yang terkait.

BAB V: PENUTUP

Dalam Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran untuk masyarakat dan lembaga yang terkait dengan pembahasan skripsi ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1 Kajian Umum Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian perlindungan yaitu (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Dari kedua definisi tersebut terdapat makna kemiripan dari unsur-unsur perlindungan, yaitu:

1. Unsur tindakan melindungi;
2. Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi;
3. Unsur cara melindungi

Berdasarkan unsur-unsur di atas, kata perlindungan mengandung makna suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlindungan terhadap warga negara dapat dilakukan melalui berbagai cara diantaranya perlindungan ekonomi, sosial, politik, dan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut¹:

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban;
 - b. Menjamin hak-hak para subyek hukum

¹ Wahyu Sasongko, **Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen**, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 31

2. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:

- a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum.
- b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana.
- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²

Perlindungan hukum preventif menurut Hadjon adalah yang pada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu konflik atau sengketa.³

2.2 Kajian Umum Tujuan Hukum

² Philipus M Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2

³ *Ibid.* hlm 2

Menurut Lemaire, hukum yang banyak seginya serta meliputi segala lapangan menyebabkan orang tidak mungkin dapat membuat suatu definisi apa arti hukum yang sebenarnya.⁴ Perubahan masyarakat yang sangat pesat dalam setiap aspek kehidupan membawa dampak terhadap eksistensi dan keberlakuan hukum. Dampak tersebut tentu menimbulkan berbagai kemungkinan dalam proses mewujudkan tujuan-tujuan hukum yang hendak dicapai. Kemungkinan tersebut antara lain, kiprah hukum dalam masyarakat yang bias menimbulkan masalah baru, atau malah hukum bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan sosial yang berkembang di masyarakat.

Sebagian pandangan menganggap bahwa pembahasan tujuan hukum merupakan monopoli filsafat hukum, namun pandangan yang demikian kurang beralasan jika melihat kenyataan hukum dalam masyarakat. Pembahasan tujuan hukum bukan monopoli filsafat hukum meskipun sebagian besar pembahasan filsafat hukum menyangkut tujuan hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan hukum. Tujuan hukum tidak hanya dibicarakan dalam filsafat hukum namun juga dalam teori hukum.

Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal tiga jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Etis (*etische teory*)

Dalam teori ini, hukum semata-mata adalah untuk mencapai keadilan. Menurut Hans Kelsen, suatu peraturan adalah “adil” apabila benar-benar diterapkan pada semua kasus yang menurut isinya, dan suatu peraturan adalah

⁴ Lemaire dalam Pipin Syarifin, **Pengantar Ilmu Hukum**, Pustaka Setia, Bandung, 1998, hlm 21

“tidak adil” apabila diterapkan pada suatu kasus namun tidak diterapkan pada kasus lain yang sama.⁵

Aristoteles memberikan pengertian mengenai keadilan, yaitu:⁶

Justice is a political virtue, by the rules of it the state is regulated and these rules the criterion of what is right. (Keadilan merupakan kebijakan politik, dengan aturan tersebut negara diatur dan aturan tersebut merupakan kriteria aturan yang benar). Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis, yaitu :⁷

1. Keadilan distributif, yang mengacu pada pembagian barang dan jasa pada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Yang dituntut disini bukanlah keasamaan melainkan perimbangan;
2. Keadilan korektif atau remedial, yang mengacu pada pemberian keadilan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa perorangan. Yang dituntut disini adalah kesamaan, keadilan yang tak memandang kedudukannya.

b. Teori Utilitis (*Utilities Theory*)

Jeremy Bentham memberikan pendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia sebesar-besarnya (*The greatest happiness for the greatest number*).⁸ Menurut teori ini, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaannya dan memperkecil ketidakbahagiaannya atau masyarakat yang mencoba memberi

⁵ Ishaq, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2

⁶ Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)**, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 73

⁷ Ishaq. *Op Cit.* hlm.8

⁸ *Ibid.* hlm. 9

kebahagiaan yang sebesar mungkin pada rakyat dan meminimalisir ketidakbahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat.⁹

c. Teori Yuridis-Dogmatik

Aliran ini bersumber dari pemikiran positivistic yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom dan mandiri karena hukum dinilai hanya kumpulan aturan. Tujuan hukum tidak lain adalah sekedar untuk memberikan kepastian hukum. Meskipun aturan hukum atau penerapan hukum dirasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat bagi mayoritas masyarakat, hal tersebut tidak menjadikan suatu persoalan, asalkan kepastian hukum dapat terwujud.

2.3 Kajian Sifat Pengaturan Hukum Perdata

Dalam ruang lingkup hukum perdata, hukum dapat dibedakan menurut beberapa macam, salah satunya adalah menurut sifat pengaturannya. Menurut sifat pengaturannya hukum perdata dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) dan hukum pelengkap atau hukum yang bersifat mengatur (*aanvullend recht*).¹⁰

Hukum yang bersifat memaksa artinya adalah hukum yang harus ditaati tidak boleh sama sekali untuk disimpangi, misalnya saja aturan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengharuskan perkawinan harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar perkawinan itu sah. Sifat memaksa dari suatu aturan hukum

⁹ Achmad Ali. *Op Cit.* hlm. 77

¹⁰ Völmar, **Pengantar Studi Hukum Perdata**, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 5.

seringkali bertujuan untuk melindungi para pihak terhadap mereka sendiri atau juga untuk melindungi para pihak yang lebih lemah daripada pihak lain.¹¹

Hukum yang bersifat pelengkap atau hukum yang sifatnya mengatur adalah hukum yang bias disimpangi atau dikesampingkan apabila para pihak menghendaknya, misalnya saja aturan dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa atas persetujuan para pihak yang melakukan perkawinan dapat membuat suatu perjanjian perkawinan, artinya jika para pihak yang melakukan perkawinan tidak membuat perjanjian perkawinan pada saat perkawinan dilangsungkan juga tidak apa-apa.

2.4 Kajian Umum Kedudukan Anak

2.4.1 Pengertian dan Kedudukan Anak

Sampai saat ini belum ada kesesuaian pendapat diantara para ahli hukum sebagaimana tercantum dalam berbagai produk perundang-undangan di Indonesia mengenai pengertian anak.¹² Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian anak yang cocok dalam konteks ini adalah keturunan kedua dari bapak dan ibu.¹³

Menurut Konvensi Hak Anak penertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan dicapai lebih cepat.¹⁴

¹¹ Völmar. *Op Cit.* Hlm 6

¹² Santhos Wachjoe Prijambodo, **Bunga Rampai Hukum dan Filsafat di Indonesia**, Deepublish, Yogyakarta, 2014, hlm. 43

¹³ <http://kbbi.web.id/anak> diakses tanggal 5 November 2015

¹⁴ Pasal 1 Konvensi Hak Anak, http://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_bahasa_indonesia_version.pdf diakses tanggal 5 November 2015

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) terdapat dua macam anak yaitu anak sah dan anak luar kawin. Menurut BW tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.¹⁶ Sedangkan anak luar kawin menurut BW adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan dalam keadaan zina atau sumbang. Anak luar kawin akan menjadi sah apabila sebelum kawinnya ibu dan bapaknya telah dilakukan suatu pengakuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sama halnya dengan BW, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga ada dua macam anak yaitu anak sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau yang sering kita sebut anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹⁷ Sedangkan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

2.5 Kedudukan Anak Luar Kawin

Anak luar kawin secara umum dapat kita artikan sebagai anak yang dilahirkan di luar suatu hubungan perkawinan yang sah. Berdasarkan hukum positif di Indonesia tentang anak luar kawin yaitu Undang-undang Perkawinan,

¹⁵ Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁶ Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁷ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁸ Ini berarti anak luar kawin tidak memiliki hubungan dengan bapak biologisnya.

Hukum adat tidak memiliki cara pandang yang sama terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Tetapi pada dasarnya itu adalah hal tercela dan masing-masing masyarakat adat memiliki cara untuk mengatasinya sesuai dengan hukum adatnya masing-masing. Biasanya seorang wanita yang hamil tanpa menikah akan langsung dinikahkan dengan pria yang membuat ia hamil, namun hal itu tidak selalu memungkinkan tetapi masyarakat sudah merasa cukup apabila wanita yang hamil tadi telah menikah meskipun bukan dengan pria yang menghamilinya.¹⁹ Misalnya ada lembaga kawin paksa seperti di Bali di mana laki-laki yang menghamili si wanita dipaksa untuk mengawininya.²⁰

Dalam hukum adat juga tidak ditetapkan tenggang waktu antara waktu perkawinan dengan kelahiran anak jadi dalam keadaan hamilpun dapat dinikahi sehingga anak yang lahir bukan merupakan anak luar kawin melainkan anak sah karena lahir dalam suatu perkawinan.

Oleh sebab itu sangat jarang terjadi kasus anak luar kawin di masyarakat hukum adat, walaupun itu terjadi maka si anak hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan dianggap tidak memiliki bapak dan si anak hanya dapat mewarisi harta dari ibunya dan keluarga ibunya.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam istilah hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dinamakan *naturlijk kind* atau anak alam. Menurut sistem yang dianut oleh BW, dengan adanya keturunan saja belum menimbulkan

¹⁸ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁹ Oemarsalim, **Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 65

²⁰ Soedharyo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 39

hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya, baru setelah ada pengakuan terhadap anak timbullah hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya terutama dalam hak mewaris.

Dengan berlakunya hukum positif tentang anak luar kawin, maka implikasinya yaitu si anak berhak mewaris dari ibunya saja dan keluarga ibunya. Namun ia tidak bisa mewaris dari ayahnya sebelum ayahnya mengakuinya sebagai anak.

Anak luar kawin yang dimaksud tidak termasuk anak luar kawin dari hasil zinah atau anak zinah dan anak sumbang, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang memiliki ikatan keluarga yang dilarang untuk kawin.

2.6 Pengakuan dan Pengesahan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dikenal lembaga pengakuan dan pengesahan anak, maka aturan dalam *Burgerlijk Wetboek* tentang pengakuan dan pengesahan anak dapat diberlakukan, namun pengaturan tersebut hanya terbatas bagi penduduk yang termasuk golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan golongan Eropa.

Pengakuan anak diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 280 sampai dengan pasal 289. Pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan pada saat pencatatan akta kelahiran si anak, pada saat perkawinan dilangsungkan atau dapat dilakukan dengan tiap-tiap akta otentik.

Pengakuan dapat dilakukan oleh ibu, bapak atau keduanya, atau dapat dilakukan oleh seseorang yang bukan orang tua si anak dengan syarat orang

tersebut sudah dewasa dan pengakuan yang dilakukannya pun bukan akibat paksaan, khilaf, dan penipuan atau bujukan.

Dengan dilakukan pengakuan terhadap anak luar kawin, maka muncul hubungan keperdataan antara anak dengan kedua orang tuanya. Lalu si anak berhak mewarisi harta orang tuanya.

Pengesahan anak luar kawin dapat dilakukan kecuali terhadap anak yang ditumbuhkan dalam keadaan zinah atau sumbang.²¹ Pengesahan anak terjadi ketika bapak dan ibunya melakukan perkawinan dengan dicatatkan dalam akta perkawinan dan sebelum terjadinya perkawinan si anak harus diakui terlebih dahulu.

Apabila perkawinan telah dilakukan namun kedua orang tua si anak lali tidak mengakuinya terlebih dahulu maka pengesahan anak dapat diberikan melalui surat pengesahan Presiden dengan mendengarkan nasehat dari Mahkamah Agung.

Orang membedakan pengakuan dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Pengakuan secara sukarela
- b. Pengakuan karena terpaksa.

2.6.1 Pengakuan Secara Sukarela

Pengakuan secara sukarela dalam doktrin dirumuskan sebagai suatu pernyataan, yang mengandung pengakuan, bahwa yang bersangkutan adalah ayah atau ibu dari anak luar kawin yang diakui olehnya. Namun dengan mengingat pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk

²¹ Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

timbulnya hubungan hukum antara dirinya dengan anaknya, tidak lagi dibutuhkan pengakuan terhadap anaknya.²²

Dari ketentuan pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan bahwa pengakuan anak luar kawin sekarang khusus bagi seorang bapak, pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang didasarkan atas kehendak dari bapak si anak. Pengakuan itu cukup dilakukan dengan pernyataan sepihak dari laki-laki yang mengakui, dengan cara yang ditetapkan dalam pasal 281 Kitab undang-undang Hukum Perdata, dan tidak adanya keberata dari ibu si anak. Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa pengakuan yang dilakukan berlawanan dengan kenyataan, harus diterima tetap sah saja. Maksudnya, tidak berarti kalau laki-laki yang mengakui itu ternyata terbukti tahu, bahwa ia bukan ayah biologis dari si anak, pengakuan itu atas tuntutan pihak yang berkepentingan tidak bisa dibatalkan.²³

Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengaturan bagaimana pengakuan secara sukarela itu diberikan, yaitu dengan mengatakan “pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, apabila yang demikian itu telah dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada perkawinan itu berlangsung, dapat dilakukan dengan tiap akta otentik”.

Ada 3 cara untuk melakukan pengakuan anak luar kawin secara sukarela, yaitu:

1. Di dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan;
2. Di dalam akta perkawinan; dan
3. Di dalam akta otentik.

²² J. Satrio, **Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 113

²³ *Ibid*, hlm. 114

Karena pengakuan itu baru sah kalau diberikan di hadapan seorang notaris atau Pegawai Catatan Sipil, padahal keduanya adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan khusus untuk membuat akta-akta seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa pengakuan anak luar kawin harus diberikan dalam suatu akta otentik.²⁴

2.6.2 Pengakuan Secara Terpaksa

Pengakuan secara terpaksa terjadi apabila hakim dalam suatu perkara gugatan kedudukan anak, atas dasar persangkaan bahwa seseorang laki-laki tertentu adalah ayah dari seorang anak tertentu, menetapkan bahwa laki-laki itu adalah ayah dari anak yang bersangkutan.

Hal ini perlu dikaitkan dengan pasal 287 ayat (2) Kitab undang-undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa:

“Sementara itu, apabila terjadi salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 285 sampai dengan pasal 288, pasal 294, atau pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan pada saat berlangsungnya kejahatan itu bersesuaian dengan saat kehamilan perempuan terhadap siapa kejahatan itu dilakukan, maka atas tuntutan mereka yang berkepentingan, bolehlah si tersalah dinyatakan sebagai bapak dari si anak.”

Jadi hakim menetapkan, bahwa orang laki-laki tertentu adalah bapak dari seorang anak tertentu. Ketetapan seperti itu membawa akibat pengakuan dari laki-laki yang bersangkutan terhadap anak tertentu. Karena didasarkan atas ketetapan pengadilan, maka pengakuan seperti itu merupakan pengakuan yang dipaksakan atau terpaksa.²⁵

²⁴ *Ibid*, hlm. 116

²⁵ *Ibid*, hlm. 132

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis. Dengan demikian istilah variable bebas dan variable terikat tidak dikenal di dalam penelitian normatif.¹

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dikarenakan peneliti akan melakukan analisa tentang pentingnya pengakuan anak luar kawin dari sudut pandang BW dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dengan mengkaji peraturan yang terkait dengan hak-hak anak serta menghubungkan dengan kasus terkait putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

1.2 Metode Pendekatan

Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*)

Digunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undang yang mengatur tentang status hukum anak luar kawin dan pengakuan anak luar

¹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35

kawin, yaitu peraturan pengakuan anak luar kawin yang diatur di dalam BW dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²

b. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Digunakan untuk menelusuri perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pengakuan anak luar kawin yang berlaku mulai pada masa lampau yaitu mulai masa penjajahan Belanda hingga peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang.

1.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1.3.1 Jenis Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang otoritatif artinya mempunyai otoritas.³ Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Pasal I Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- e. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

² Johnny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 302

³ Ibid., hlm. 141

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa literatur-literatur atau buku-buku yang terkait dengan Hukum Keluarga, pengakuan dan pengesahan anak, anak luar kawin, serta doktrin-doktrin yang merupakan hasil karya dari kalangan hukum, makalah, dan lain sebagainya.

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang bisa memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti kamus, artikel, jurnal-jurnal hukum, artikel dari internet dan lain sebagainya.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui :

a. Studi Kepustakaan

Cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran pustaka, yang diperoleh dari:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya;
- 2) Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- 3) Perpustakaan Umum Pusat Kota Malang.

b. Akses Internet

Cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan mengakses website-website yang terkait dengan permasalahan penelitian.

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang mengacu pada suatu masalah tertentu kemudian dikaitkan dengan pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁵

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis bahan hukum tersebut, yaitu :

a. Mengumpulkan berbagai bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier.

Dalam bahan hukum primer, kegiatan yang dilakukan adalah memilih pasal-pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian hukum ini. Selanjutnya pada bahan hukum sekunder, dilakukan pengumpulan bahan dari buku-buku atau kepustakaan dan jurnal-jurnal hukum elektronik yang terkait. Dalam bahan hukum tersier, mengumpulkan berbagai kamus untuk menunjang hal-hal yang dianggap perlu untuk diartikan secara teoritis.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 1990. hlm. 29

⁵ Ibid. hlm. 251-252

- b. Mengolah data dari ketiga bahan hukum yang telah dikumpulkan.
1. Pada bahan hukum primer digunakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat tentang hak-hak anak baik hak mendapatkan hidup yang layak maupun hak mewaris dari orang tuanya yang tersebar di berbagai undang-undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
 2. Pada bahan hukum sekunder digunakan analisis terhadap berbagai sumber buku-buku atau kepustakaan para pakar hukum juga jurnal-jurnal hukum terkait sehingga menghasilkan sinkronisasi dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan.
 3. Pada bahan hukum tersier digunakan analisis terhadap kamus atau ensiklopedia sebagai awal untuk memberikan suatu pengertian.
- c. Terhadap ketiga bahan hukum diatas, kemudian dilakukan interpretasi menggunakan metode interpretasi teleologis dan interpretasi gramatikal.
1. Interpretasi teleologis adalah pemaknaan suatu aturan hukum yang ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum tersebut dan apa yang ingin dicapai dalam masyarakat, maka dengan begitu diharapkan dengan menggunakan metode ini penulis dapat menafsirkan pengaturan lembaga pengakuan dalam BW berdasarkan tujuan pembuatannya.⁶

⁶ Johnny Ibrahim, **Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 222

2. Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa, dan kaidah hukum tata bahasa, maka dengan menggunakan jenis interpretasi ini penulis dapat menafsirkan pengaturan lembaga pengakuan dalam BW sesuai dengan susunan tata bahasa yang tertulis dalam aturan tersebut.⁷

3.6 Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini digunakan beberapa definisi konseptual sebagai kata kunci yaitu sebagai berikut:

1. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar suatu perkawinan yang sah termasuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hak-hak keperdataan anak adalah hak untuk mendapat pendidikan dan pemeliharaan dari orang tua atau wali.
3. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi anak yang bersifat preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menghindari timbulnya suatu sengketa.
4. Lembaga pengakuan anak adalah lembaga pengakuan anak luar kawin yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* yang bertujuan untuk mendapatkan hak pemeliharaan dan memperoleh pendidikan.

⁷ Achmad Ali, *Op Cit.* hlm. 164-165

BAB IV

PEMBAHASAN

1.1 Perkembangan Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Kawin

Seperti yang kita ketahui, pada masa lalu Indonesia adalah Hindia Belanda suatu daerah jajahan milik kerajaan Belanda. Pada masa itu terdapat suatu peraturan yang kita kenal dengan nama IS (*indische staatsregeling*) yaitu Aturan Pemerintah Hindia Belanda. Dalam pasal 163 IS menyatakan, bahwa dalam hubungan berlakunya BW di Indonesia, penduduk di Hindia Belanda dibagi dalam tiga golongan yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing dan golongan Bumi Putera (Indonesia asli). Dengan demikian maka hukum yang berlaku di Indonesia pada masa itu dalam bidang perdata ada dua yaitu hukum perdata Eropa atau BW dan hukum perdata adat. Hal ini mengakibatkan dualisme dalam lapangan hukum perdata, sehingga sampai sekarang pun belum terdapat suatu unifikasi dalam lapangan hukum perdata.

Adanya pembagian golongan penduduk menimbulkan suatu akibat yaitu berlakunya hukum perdata yang berbeda untuk masing-masing golongan penduduk seperti yang dinyatakan dalam pasal 131 IS. terhadap golongan Eropa harus dianut perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang. Terhadap orang Indonesia asli dan Timur Asing, ketentuan perundang-undangan Eropa dalam hukum perdata dan hukum dagang dapat diperlakukan bilamana kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendaki.

Pada masa Hindia Belanda, banyak orang-orang Eropa khususnya yang laki-laki yang sudah menikah mengambil wanita-wanita pribumi untuk tinggal bersama sebagai gundiknya. Dari perbuatan tersebut tentu dapat berakibat lahirnya suatu anak di luar suatu perkawinan yang sah. Karena anak yang lahir dari perbuatan tersebut tidak dapat dijadikan anak sah, maka jalan satu-satunya agar ayah biologisnya dapat memiliki hubungan keperdataan dengan si anak adalah dengan melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut. Pada masa itu pengakuan dilakukan di muka pengadilan, dan setelah dilakukan pengakuan anak tersebut timbullah hubungan keperdataan antara ayah biologis dengan anak luar kawin yang telah diakui itu, juga si anak berhak memakai nama belakang ayahnya.

Tindakan pengakuan anak luar kawin seperti yang diceritakan dalam paragraf sebelumnya didasari oleh pengaturan lembaga pengakuan anak yang terdapat di dalam BW buku pertama karena yang melakukan pengakuan adalah orang Eropa.

Naturlijk kind atau anak luar kawin sendiri terdiri dari beberapa macam diantaranya anak luar kawin yang tidak diakui bapak biologisnya, anak luar kawin yang diakui, anak luar kawin yang disahkan, anak sumbang dan anak zinah. Dalam penelitian ini anak luar kawin tidak termasuk anak sumbang dan anak zinah. Pembagian macam-macam anak luar kawin itu dilakukan karena undang-undang sendiri dan ketentuan-ketentuannya menimbulkan akibat hukum yang berbeda-beda terhadap macam-macam anak yang telah disebut di atas.

Anak luar kawin yang tidak diakui oleh bapak biologisnya adalah anak yang lahir di luar perkawinan dan tidak diakui oleh bapak biologisnya. Anak luar kawin yang tidak diakui oleh bapak biologisnya tidak memiliki hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya. Namun sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak luar kawin juga tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya jika sang ibu tidak mengakui anaknya. Namun sekarang menurut pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak luar kawin otomatis memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun si anak luar kawin tetap tidak memiliki hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya sebelum bapak biologisnya melakukan pengakuan terhadap si anak. Anak luar kawin yang tidak diakui oleh bapak biologisnya bukan merupakan ahli waris ab intestato dari bapak biologisnya yang tidak mengakuinya, oleh karena itu si anak tidak dapat mengajukan gugatan waris kepada bapak biologisnya. Anak luar kawin yang tidak diakui oleh bapak biologisnya hanya dapat menjadi ahli waris melalui wasiat sehingga ia menjadi ahli waris testamenter, sepanjang wasiat itu tidak mengurangi *legitimate portie* milik ahli waris ab intestato dari bapak biologisnya.

Apabila kita melihat prinsip di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan hukum antara orang tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara orang tua dan anaknya. Akan tetapi, bila kita hubungkan dengan anak luar kawin, hubungan keperdataan antara bapak biologis dengan anak luar kawin didasarkan pada hubungan darah melalui suatu perbuatan hukum yaitu pengakuan, dengan demikian hubungan darah yang dimaksud belakangan ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis bukan arti biologis.

Kedudukan anak luar kawin di mata hukum juga lebih rendah jika dibandingkan dengan anak sah, dalam masalah waris anak luar kawin menerima bagian yang lebih kecil dibanding yang diterima oleh anak sah. Di samping itu kedudukan anak luar kawin dalam pengasuhan juga berbeda dengan anak sah. Anak sah berada dalam kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam pasal 299 KUHPerdara, sedangkan anak luar kawin berada dalam perwalian menurut pasal 306 KUHPerdara.

Dalam paragraf di atas sebelumnya telah dikatakan bahwa bapak biologis yang tidak mengakui anak luar kawin sebagai anaknya tidak memiliki hubungan keperdataan dengan anaknya. Sehingga akibatnya, si bapak biologisnya ini tidak memiliki kewajiban untuk perawatan dan pemeliharaan terhadap si anak. Padahal dalam Undang-Undang Dasar kita disebutkan dalam pasal 28B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam bab III disebutkan berbagai hak-hak anak yang berhubungan dengan perawatan, pemeliharaan dan pendidikan sebagaimana telah diperbaiki dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Dengan tidak adanya kewajiban bagi sang bapak biologisnya untuk memenuhi hak-hak anak maka sangat memungkinkan jika anak luar kawin tidak dapat sepenuhnya menikmati hak atas perawatan, pemeliharaan dan pendidikan. Terutama bagi anak luar kawin yang lahir dalam lingkungan ekonomi yang menengah ke bawah pasti akan sulit bagi ibu biologisnya untuk membesarkan anak seorang diri tanpa bantuan dari bapak biologis anak luar kawin tersebut.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 /PUU-VIII/2010 juga diputuskan bahwa anak luar kawin secara otomatis juga memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki yang dengan bantuan teknologi dapat dibuktikan sebagai bapak biologisnya. Namun tentu putusan tersebut tidak bisa langsung dijalankan dan bisa saja bapak biologis dari anak luar kawin tetap melepaskan diri dari tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anaknya.

Selain dalam peraturan yang telah disebutkan beberapa di atas, dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga terdapat pasal yang isinya bermaksud untuk melindungi hak-hak anak. Pasal 12 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai hak asasi manusia”. Bunyi pasal di atas pada kata setiap orang berarti termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang lebih khusus lagi juga termasuk anak luar kawin.

Lebih khusus lagi dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam bab III pasal 52 sampai dengan pasal 66 diatur secara khusus hak anak diantaranya yang menjadi fokus dalam pengaturan tersebut adalah hak anak untuk mendapat pendidikan, perlindungan dari orang tuanya, pemeliharaan, pengembangan minat dan bakat serta masih banyak lainnya.

Dari sekian banyak peraturan-peraturan di atas yang menyangkut perlindungan hukum bagi anak termasuk bagi anak luar kawin di dalamnya,

peraturan-peraturan tersebut dapat digolongkan sebagai peraturan yang bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban untuk anak. Namun belum ada peraturan yang menjamin pemenuhan hak-hak subyek hukum dalam hal ini si anak tersebut oleh kedua orang tuanya atau walinya. Seharusnya pemerintah tidak hanya membuat peraturan yang memberikan hak dan kewajiban untuk anak saja, namun juga membuat peraturan yang dapat digunakan sebagai jaminan bahwa hak-hak si anak ini dapat dipenuhi dengan diberlakukannya peraturan tersebut.

Sangat disayangkan jika kita sudah memiliki banyak peraturan-peraturan sebagai sarana yang dapat melindungi hak-hak anak namun tidak ada peraturan yang menjamin dipenuhinya hak-hak tersebut. Hal ini akan membuat peraturan yang memberikan perlindungan hak-hak anak menjadi tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena tidak adanya peraturan sebagai alat pemaksa berlakunya peraturan-peraturan yang memberikan hak-hak anak.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif yang bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa yang diakibatkan oleh permasalahan tentang pemenuhan hak-hak anak. Maka dari itu sangatlah dibutuhkan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak supaya dapat meminimalisir terjadinya sengketa dalam masalah pengasuhan anak agar si anak benar-benar mendapatkan perlindungan hukum yang dapat menjadi dasar keberlangsungan hidupnya.



Tabel 4.1 Perbandingan Perlindungan Hukum Tentang Pendidikan

Perlindungan Hukum	UUDNRI 1945	BW	UU Nomor 1 Tahun 1974	UU Nomor 4 Tahun 1979	UU Nomor 39 Tahun 1999	UU Nomor 23 Tahun 2002	UU Nomor 35 Tahun 2014	Keterangan
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 28C ayat (1): Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. - Pasal 31 ayat (1): Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. - Pasal 31 ayat (2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 	<p>Pasal 298 ayat (2): Si ayah dan si ibu keduanya berwajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan-orang tua atau untuk menjadi wali tak membebaskan mereka dari kewajiban, memberi tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai pendidikan itu. Terhadap anak-anak yang telah dewasa, berakutlah ketentuan-ketentuan tertantum bagian ketiga bab ini.</p>	<p>Pasal 45 ayat (1): Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.</p>	<p>Hak untuk memperoleh pendidikan tidak terdapat pada undang-undang ini.</p>	<p>Pasal 60 ayat (1): Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.</p>	<p>Pasal 9 ayat (1): Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.</p>	<p>Pasal 9 ayat (1a) ditambah perlindungan oleh satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik.</p>	<p>BW tidak secara spesifik menyebutkan bahwa anak berhak memperoleh pendidikan, namun dalam pasal 298 disebutkan bahwa kewajiban orang tua adalah mendidik anaknya. Sedangkan dalam UU no. 4 th 1979 tidak mengatur bahwa pendidikan merupakan hak anak, UU ini hanya menekankan pada kesejahteraan anak. Sementara itu dalam UU no. 39 th 1999 dan UU no 23 th 2002 terdapat kesamaan pikiran tentang hak pendidikan bagi anak yang diadopsi dari UUDNRI 1945 pasal 28C ayat (1).</p>

Tabel 4.2 Perbandingan Perlindungan Hukum Tentang Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak

Perlindungan Hukum	UUDNRI 1945	BW	UU Nomor 1 Tahun 1974	UU Nomor 4 tahun 1979	UU Nomor 39 Tahun 1999	UU Nomor 23 Tahun 2002	UU Nomor 35 Tahun 2014	Keterangan
Pemeliharaan dan Pengasuhan	Pasal 34 ayat (1): Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.	Pasal 298 ayat (2): Si ayah dan si ibu keduanya berwajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan-orang tua atau untuk menjadi wali tak membebaskan mereka dari kewajiban, memberi tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan itu. Terhadap anak-anak yang telah dewasa, berakulah ketentuan-ketentuan tertentu bagian ketiga bab ini.	Pasal 45 ayat (1): Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.	- Pasal 2 ayat (1): Anak berhak atas perawatan, kesejahteraan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam maupun keluarganya. - Pasal 2 ayat (3): Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan.	- Pasal 56 ayat (1): Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan asuh orang tuanya sendiri. - Dalam ayat (2) diatur jika orang tua tidak dapat menjamin pemeliharaan terhadap anak maka anak dapat diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat.	- Pasal 7 ayat (1): Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan asuh orang tuanya sendiri. - Dalam ayat (2) diatur jika orang tua tidak dapat menjamin pemeliharaan terhadap anak maka anak dapat diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat.	Tidak terdapat perubahan pengaturan pengasuhan, sama seperti UU No. 23 th 2002.	Dalam UUDNRI 1945, BW, dan undang-undang lain yang terkait dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak intinya sama yaitu orang tua, wali ataupun negara bertanggungjawab atas kelangsungan hidup anak.

Dari tabel di atas kita dapat membedakan pengaturan-pengaturan hak-hak anak mulai dari masa BW hingga sekarang ini, jika kita mencermati peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak-hak anak, pertama kita tidak akan menjumpai perbedaan hak-hak anak berdasarkan apakah dia anak sah ataupun anak luar kawin kecuali dalam hal waris tentu di sana ada perbedaan bagian waris antara anak sah dan anak luar kawin. Namun untuk hak-hak yang lain seperti hak untuk memperoleh pendidikan ataupun pengasuhan, undang-undang tidak membuat perbedaan.

Meskipun ada beberapa pengaturan tentang perlindungan hak-hak anak namun hak-hak anak yang diatur masing-masing peraturan perundang-undangan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, bahkan saling melengkapi jika terdapat kekurangan pada peraturan perundang-undangan yang lain.

Salah satu kesamaan hak-hak yang diatur diantaranya yaitu hak untuk mendapat pengasuhan dan perlindungan dari orang tua atau walinya, dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pengasuhan diatur dalam pasal 2 ayat (1), dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur dalam pasal 7 ayat (1), dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam pasal 56 ayat (1).

Jika kita membahas satu per satu pasal per pasal dari tabel di atas dalam kolom pendidikan, pada UUDNRI 1945 pasal 28C ayat (1) bisa dimaknai sebagai berikut, setiap warga negara yang berarti termasuk anak-anak di dalamnya bebas untuk mengembangkan dirinya menjadi pribadi yang lebih baik salah satu caranya yaitu melalui pendidikan formal yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah baik

negeri maupun swasta dengan harapan setelah menjadi pribadi yang lebih baik, orang tersebut dapat berguna bagi bangsa dan negara. Lalu pada pasal 31 dikatakan “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, kembali pada penafsiran penulis bahwa setiap warga negara termasuk di dalamnya adalah anak-anak berhak mendapatkan pendidikan, konstitusi kita tidak membedakan subyek yang berhak mendapat pendidikan adalah anak sah atau anak luar kawin. Dilihat dari tujuan pembuatan ketentuan dalam UUDNRI 1945 pasal 28C dan 31, pembuat peraturan perundang-undangan berharap jika hak-hak anak terutama hak memperoleh pendidikan diberikan pada setiap anak, maka Indonesia dapat menjadi bangsa yang maju, berdaulat, makmur dan sejahtera.

Kemudian dalam BW pasal 298 ayat (2), kata “si ayah dan si ibu” berwajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa.” bisa dimaknai bahwa orang tua wajib sebagai hak alimentasi anak untuk mendidik anak baik mendidik sopan santun dan perilakunya dalam hal ini pendidikan informal di luar sekolah dan orang tua wajib menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah dasar dan menengah. Makna dari pasal 298 ayat (2) BW ini sama dengan pasal 45 ayat (1) karena memang redaksi penulisan ketentuan dari kedua pasal ini hampir sama.

Sedangkan pada Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak tidak mencantumkan pendidikan sebagai salah satu hak yang dapat menunjang kesejahteraan anak, Undang-undang ini hanya menekankan pada bagaimana si anak dapat memperoleh asuhan dengan segala kasih sayang orang tua dan perlindungannya agar si anak dapat mengembangkan diri sesuai minat dan bakatnya agar berguna dalam kehidupan sosialnya.

Pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 60 ayat (1) kata-kata “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.” Bisa dimaknai bahwa pasal ini menekankan pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal di sekolah-sekolah karena terdapat kata “pengajaran” pada pasal tersebut. Namun tentu saja pendidikan di sekolah tidak melulu soal pelajaran di ruang kelas namun juga pengembangan minat bakat dan kemampuan berorganisasi melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Ketentuan dalam pasal ini sama dengan yang terdapat pada pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena penulisan kata-kata dalam kedua pasal tersebut sama persis. Maka dari itu kita dapat memaknai pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sama dengan pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyempurnakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak merubah ketentuan tentang hak memperoleh pendidikan untuk anak, hanya menambahkan 1 ayat pada pasal 9 yaitu ayat (1a) yang berisikan catatan kepada lembaga penyelenggara pendidikan untuk melindungi anak didiknya dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik.

Dari macam-macam pasal di atas dan pemaknaan yang berbeda-beda namun intinya yang utama adalah memberikan anak hak untuk memperoleh pendidikan itu penting karena anak merupakan generasi penerus bangsa, tidak

mungkin negeri kita dapat menjadi bangsa yang besar jika penerusnya saja tidak sekolah, tidak terdidik. Maksud dari pembuat undang-undang yang merumuskan hak anak untuk memperoleh pendidikan sedemikian rupa adalah agar anak dapat menjadi penerus bangsa yang berkualitas dan berpendidikan supaya bangsa ini dapat menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera.

Selanjutnya kita dapat mencermati satu per satu pasal dalam undang-undang yang terkait dengan pemeliharaan dan pengasuhan anak, pada pasal 34 ayat (1) UUDNRI 1945 dikatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, maksud dari pasal ini adalah anak-anak yang terlantar yaitu anak yang tidak memiliki orang tua maupun anak jalanan yang tidak mendapat pemeliharaan dan pengasuhan dari orang tua atau walinya menjadi tanggungan negara untuk merawatnya, gambaran secara umum negara menyediakan pelayanan bagi anak terlantar dalam suatu instansi yang bertugas untuk memelihara dan mengasuh anak sampai anak tersebut dapat hidup sendiri.

Kemudian dalam BW pasal 298 ayat (2), kata “si ayah dan si ibu berwajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa.” bisa dimaknai bahwa orang tua wajib sebagai hak alimentasi anak untuk memelihara si anak, memelihara dapat diartikan bahwa orang tua wajib memenuhi segala kebutuhan si anak mulai dari sandang , pangan dan papan sehingga anak dapat tumbuh berkembang dengan normal, tentu saja orang tua tidak memelihara anak dengan materi saja namun juga dengan kasih sayang sehingga anak tidak merasa sebagai objek. Makna dari pasal 298 ayat (2) BW ini sama dengan pasal 45 ayat (1) karena memang redaksi penulisan ketentuan dari kedua pasal ini hampir sama.

Sedangkan pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak penekanan unsur perhatian orang tua dalam memelihara dan mengasuh anaknya dapat dimaknai bahwa undang-undang ini menginginkan agar anak tumbuh berkembang dalam lingkungan yang damai dan penuh kasih sayang agar tidak menjadi pribadi yang emosional dan tempramen. Dalam ayat (3) orang tua wajib memelihara dan melindungi si anak bahkan sejak dalam kandungan, ini berarti si anak dianggap sebagai entitas yang berdiri sendiri yang sudah ada posisinya lemah dan membutuhkan perlindungan meskipun ia masih berada dalam kandungan.

Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dapat dimaknai bahwa setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, mengetahui tidak sekedar nama orang tua namun juga kenal dan berinteraksi layaknya dalam keluarga hubungan antara orang tua dan anak, dan orang tua wajib mengasuh dan membesarkan si anak dalam arti orang tua wajib memenuhi segala kebutuhan anak baik kebutuhan jasmani maupun nonjasmani seperti kasih sayang dan rasa aman sesuai dengan kemampuan orang tua masing-masing. Lalu dalam ayat (2) mengatur jika orang tua tidak mampu mengasuh dan membesarkan si anak, maka si anak dapat diasuh sebagai anak angkat atau anak asuh oleh orang lain yang bukan orang tua si anak tersebut agar kebutuhan si anak diharapkan dapat terpenuhi, dalam ayat (2) ini berarti negara menyediakan suatu proses administrasi untuk memindahkan kekuasaan orang tua terhadap anak kepada orang tua asuh atau walinya. Pemaknaan terhadap kedua ketentuan di atas juga dapat diterapkan pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena kesamaan redaksional dari kedua ketentuan tersebut.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak terdapat perubahan pengaturan pemeliharaan dan pengasuhan anak, pengaturannya tetap sama seperti yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam UUDNRI 1945, BW dan undang-undang lain yang terkait dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak intinya sama yaitu orang tua, wali, ataupun negara bertanggungjawab atas kelangsungan hidup anak.

Pemenuhan hak-hak anak terutama untuk memperoleh pendidikan dan pengasuhan dan pemeliharaan tersebut dapat terrealisasi jika anak yang dimaksud adalah anak sah, anak yang diketahui dengan jelas silsilah keluarganya siapa ayah dan ibunya, akan berbeda kasusnya jika yang dibicarakan adalah anak luar kawin. Untuk mendapat pengasuhan dan pemeliharaan dari kedua orang tuanya, anak luar kawin perlu mendapatkan pengakuan dari bapak biologisnya atau pengesahan anak.

1.2 Pengakuan Anak Luar Kawin Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang kedudukan anak, yang pertama dalam pasal 42 yang menyatakan bahwa "*anak yang sah adalah anak*

yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Yang kedua yaitu kedudukan anak luar kawin yang diatur dalam pasal 43, yang menyatakan bahwa *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, hal ini berarti seorang anak luar kawin akan langsung memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, namun tidak dengan ayah biologisnya, oleh karena itu yang berkepentingan memberikan pengakuan terhadap si anak adalah ayahnya saja.

Undang-undang Perkawinan tidak mengatur mengenai pengakuan anak luar kawin, namun dalam kehidupan sehari-hari pengakuan dan pengesahan anak terjadi dilakukan dan dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengakuan dan pengesahan anak dapat dijumpai dalam pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam lapangan hukum adat, tidak dikenal anak luar kawin. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan masyarakat adat, wanita yang mengandung tetapi belum bersuami akan langsung dikawinkan dengan laki-laki yang menyebabkan wanita tersebut mengandung.

Sedangkan kedudukan anak luar kawin dalam hukum adat sendiri adalah sama seperti seorang anak sah dalam hubungan terhadap ibunya. Jadi, anak luar kawin tersebut pada dasarnya mempunyai hubungan hukum dengan wanita yang melahirkannya, sedangkan dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak memiliki hubungan hukum.

Kita dapat memproyeksikan kedudukan anak luar kawin dalam hukum adat dengan melihat kepada beberapa masyarakat adat seperti di Mentawai,

Ambon, Timor dan Minahasa. Dalam masyarakat adat tersebut, wanita yang melahirkan anak luar kawin adalah ibu dari anak tersebut sehingga kehidupan berjalan biasa saja seperti si ibu tersebut melahirkan dalam suatu perkawinan yang sah.

Akan tetapi di beberapa daerah lainnya, ada pendapat yang wajib mencela dengan keras si ibu yang tidak kawin tetapi melahirkan dan terhadap anaknya yang dilahirkan itu.

Namun dengan perkembangan kebudayaan maka terciptalah aturan-aturan untuk mencegah anak luar kawin sekaligus ibunya tertimpa nasib yang malang, yaitu melalui pembentukan lembaga hukum tertentu dalam hukum adat yang disebut lembaga hukum kawin penutup malu (*schaamte bedecking*). *Schaamte bedecking* atau lembaga hukum kawin penutup malu dapat dibedakan menjadi:

1. Kawin Paksa (*Gedwongen Huwelijk*)

Kawin paksa adalah perkawinan di mana seorang wanita yang tidak dalam keadaan kawin tetapi mengandung dengan laki-laki yang menyebabkan wanita itu mengandung. Tindakan yang demikian ini misalnya terjadi di Sumatera Selatan selalu diambil dalam rapat marga, demikian juga di Bali, apabila lelaki yang menyebabkan wanita tersebut tidak mau mengawini wanita yang telah mengandung dan telah melahirkan anak karenanya maka ia dapat dijatuhi hukuman secara adat.

2. Kawin Sempurna (*Nood Huwelijk*)

Kawin sempurna adalah perkawinan di mana seorang wanita yang tidak kawin tetapi mengandung dengan laki-laki siapa saja yang mau

menjadi suami wanita tersebut dengan maksud agar kelahiran bayi tersebut jatuh dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Dalam masyarakat adat Jawa, perkawinan seperti ini dinamakan perkawinan *Nikah Tambelan* sedangkan di masyarakat adat Jawa Barat atau Sunda dinamakan *Kawin Tambealan* atau *Kawin Liwat* atau *Kawin Bapak Angkat*.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 September 1958 Nomor 216K/SIP/1958 menyatakan bahwa “di dalam hukum adat, pada dasarnya anak yang lahir di dalam ikatan perkawinan adalah sah meskipun kelahirannya disebabkan bukan oleh laki-laki yang menjadi suami, secara yuridis ibu dari anak tersebut adalah wanita yang melahirkan dan anak ayah tersebut adalah suami wanita itu.”.

Dalam hak kewarisan, anak luar kawin yang sistem hukum adatnya menganut system parental, si anak akan mewaris secara penuh dari ibunya maupun menggantikan kedudukan ibunya mewaris dari neneknya. Dalam masyarakat adat Jawa anak luar kawin disebut dengan *anak kowar*, anak tersebut hanya dapat mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya tidak dari ayahnya. Demikian juga apabila kemudian ibunya setelah anak itu lahir kawin dengan laki-laki yang membenihkan anak tersebut dan si anak tinggal dengan ayah kandungnya, si anak tetap tidak dapat mewaris dari ayahnya.

Yang ingin penulis utarakan dari jabaran kedudukan anak luar kawin menurut hukum adat di atas adalah hukum adat tidak mengenal anak luar kawin karena kebanyakan si ibu dari anak luar kawin akan langsung dikawinkan sehingga si anak lahir dalam suatu ikatan perkawinan. Namun, apabila dalam

masyarakat terdapat anak yang lahir di luar suatu perkawinan anak tersebut juga dapat diakui oleh ayah biologisnya menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 49 dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang tersebut.

Hal tersebut tergantung dari masing-masing pihak apakah pihak-pihak yang bersangkutan tunduk pada hukum positif di Indonesia yang berlaku secara nasional atau mereka tunduk pada hukum adatnya masing-masing. Namun jika si ayah biologisnya mau mengakui anak tersebut menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia maka akan lebih terdapat kepastian hukum akan terjaminnya hak-hak anak tersebut dan mengenai hubungan hukum dengan ayah kandungnya.

Bila dibandingkan dengan pasal 280 BW dapat dikatakan, bahwa yang berkepentingan untuk memberikan pengakuan terhadap anak luar kawin adalah ayah ataupun ibunya. Meskipun pengakuan anak oleh ibunya terdengar tidak lazim, namun itulah ketentuan yang ada dalam BW, yaitu seorang ibu perlu untuk mengakui anaknya agar timbul hubungan keperdataan antara dirinya dengan anaknya.¹

Dalam KUHPerdata negara Belanda yang baru yang mulai berlaku sejak tahun 1956, ketentuan tersebut sudah dicabut sehingga si ibu dari si anak tidak perlu melakukan pengakuan dan secara otomatis telah memiliki hubungan keperdataan dengan anaknya. Jadi hanya si bapak biologisnya saja yang berkepentingan melakukan pengakuan terhadap anaknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²

¹ J. Satrio, *op cit.*, hlm. 125

² Subekti, **Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris**, PT Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 14

Namun perlu ditegaskan kembali, bahwa terdapat beberapa macam anak luar kawin, selain anak luar kawin yang dapat diakui ada juga anak zinah dan anak sumbang. Anak zinah adalah anak yang salah satu atau kedua orang tuanya pada saat membenihkan telah terikat dengan suatu perkawinan dengan orang lain. Sedangkan anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari perempuan dan laki-laki yang keduanya tidak dapat melakukan perkawinan karena dilarang oleh undang-undang perkawinan.

Anak zinah dan anak sumbang yang dijelaskan secara singkat dalam paragraf sebelumnya tidak dapat diakui oleh ayah biologisnya sehingga mereka hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja seperti yang tertulis dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada tahun 2011 silam menimbulkan komplikasi dalam masalah hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Dalam putusan tersebut si ayah biologis juga memiliki hubungan keperdataan dengan anaknya apabila si ayah benar-benar diketahui sebagai ayah biologisnya dengan melalui kecanggihan teknologi yang biasa kita kenal dengan tes DNA.

Namun tes DNA bukanlah suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum diantara keduanya, menurut penulis tetap harus dilakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut oleh ayah biologisnya yang dituangkan dalam suatu akta yang berisi pernyataan pengakuan terhadap si anak.

1.3 Dasar Hukum yang Digunakan Untuk Melakukan Pengakuan Anak Luar Kawin Dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek (BW)* dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, berdasarkan pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hubungan keperdataan antara seorang ibu dengan anak luar kawin otomatis timbul segera sejak anak tersebut dilahirkan tanpa perlu adanya pengakuan yang dilakukan oleh si ibu tersebut. Akan tetapi untuk si ayah, si ayah harus terlebih dahulu melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut untuk memiliki hubungan keperdataan dengan si anak.

Undang-undang Perkawinan tidak mengatur mengenai pengakuan anak luar kawin, namun dalam kehidupan sehari-hari pengakuan dan pengesahan anak terjadi dilakukan dan dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengakuan dan pengesahan anak dapat dijumpai dalam pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Karena dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur tentang pengakuan anak luar kawin, maka menurut analisa penulis yang menjadi dasar hukum dalam pasal 49 dan pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin adalah ketentuan pengakuan anak luar kawin yang terdapat dalam BW.

Dalam pengaturan tentang pengakuan anak luar kawin dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan yang baru, salah satu ketentuan yaitu dalam pasal 49 ayat (2) menyebutkan bahwa pengakuan anak luar kawin hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya sudah melakukan perkawinan menurut hukum agama tetapi belum dicatatkan. Hal ini tentu memberatkan bagi anak luar kawin yang orang tuanya tidak dapat menikah karena salah satunya telah memiliki hubungan perkawinan masing-masing. Itu artinya bagi anak tersebut tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya karena kedua orang tuanya tidak terikat perkawinan.

Konsekuensi dari ketentuan pengakuan anak yang telah disebutkan dalam paragraf sebelumnya tentu sangat besar, salah satunya tentu si anak luar kawin berpotensi kehilangan kesempatan untuk dapat menikmati hak-haknya. Karena sejak keluarnya pasal tersebut, orang tua yang ingin mengakui anak luar kawinnya harus melakukan perkawinan terlebih dahulu, padahal bisa saja kedua orang tua tersebut salah satunya telah terikat perkawinan dengan orang lain sehingga menghalangi si anak untuk dapat diakui.

Selain itu hal tersebut dapat dipastikan tidak sesuai dengan konsep pengakuan anak luar kawin. Konsep pengakuan anak luar kawin adalah orang tua dari anak luar kawin tersebut dapat mengakui anak luar kawinnya tanpa harus melakukan perkawinan yang sah terlebih dahulu. Jika orang tua anak luar kawin harus melakukan perkawinan sebelum mengakui anak tersebut maka tidak perlu lagi diadakannya pengakuan anak luar kawin lagi karena anak tersebut dapat disahkan kemudian statusnya menjadi anak yang disahkan.

Dipakainya ketentuan yang terdapat dalam BW tentang pengakuan anak luar kawin adalah tepat untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak diaturnya pengakuan anak luar kawin dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahkan setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, pembuat undang-undang tidak segera merevisi sesuai keputusan hakim konstitusi yang tertuang dalam putusan tersebut.

Pengaturan pengakuan anak luar kawin dalam BW merupakan dasar dari pengaturan pengakuan anak luar kawin yang diatur dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan. Maka dari itu dapat kita katakan bahwa pengaturan pengakuan anak luar kawin yang diatur dalam BW adalah hukum materiil sedangkan yang diatur dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan adalah hukum formilnya.

1.4 Pengaturan Pengakuan Anak Luar Kawin sebagai Wujud Perlindungan Hukum

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin telah memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, namun hubungan itu tidak serta merta timbul setelah putusan tersebut dikeluarkan karena masih terdapat kekosongan hukum pada saat eksekusi pemenuhan hak tersebut. Hal ini timbul akibat dari ketika muncul putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak langsung direvisi oleh pembuat undang-undang sesuai dengan isi putusan tersebut termasuk di dalamnya aturan-aturan tentang pengakuan anak luar kawin agar si anak mendapat kepastian tentang pemenuhan hak-haknya.

Sesuai dengan pasal 58 Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” maka dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ketentuan pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan harus dibaca sesuai yang tercantum dalam amar putusan tersebut.

Namun putusan Mahkamah Konstitusi memang tidak termasuk di dalam urutan hierarki peraturan-perundang-undangan yang dimaksud pada pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga keputusan majelis hakim konstitusi yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut tidak dapat serta merta dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dibaca sebagai “Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”, jika tidak dimaknai demikian maka ketentuan dalam pasal tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.³ Namun apakah bunyi pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetap seperti yang lama sebelum keluarnya putusan

³ Maruarar Siahaan, **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hlm. 218

Mahkamah Konstitusi tersebut? Seharusnya pembuat undang-undang langsung tanggap dengan memperbaiki ketentuan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Oleh karena itu untuk sementara sampai undang-undang yang bersangkutan diperbaiki, terdapat alternatif lain untuk mengisi kekosongan hukum tersebut yaitu dengan menerapkan aturan pengakuan anak luar kawin yang diatur dalam BW. Jadi setelah diakuinya anak luar kawin oleh ayah biologisnya menurut aturan yang ada dalam BW, maka dari perbuatan pengakuan itulah timbul pelaksanaan hubungan keperdataan antara ayah biologis dan anaknya sehingga si ayah terikat oleh kewajiban untuk memelihara dan mendidik si anak sampai si anak dapat berdiri sendiri.

Tentu tidak semua aturan pengakuan anak dalam BW yang diadopsi sebagai hukum positif pengakuan anak luar kawin, tentu ada beberapa hal yang akan disesuaikan dengan keadaan sosial masyarakat Indonesia pada masa sekarang ini, karena aturan dalam BW tersebut adalah aturan yang diberlakukan ketika masa penjajahan kolonial Belanda.

Semua peraturan-peraturan yang disebut di atas tadi dapat kita golongan sebagai peraturan yang memberikan hak dan kewajiban bagi anak luar kawin dan bagi kedua orang tuanya. Misalnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah disempurnakan melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang memberikan anak hak-haknya.

Sedangkan peraturan lembaga pengakuan anak luar kawin yang terdapat dalam BW adalah peraturan yang sifatnya hanya mengatur (*anfullen recht*) saja.

setiap peraturan yang bersifat mengatur tentu dapat disimpangi oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan peraturan tersebut.

Dalam hal ini kaitannya dengan lembaga pengakuan anak luar kawin, peraturan tersebut adalah peraturan yang bersifat mengatur. Peraturan yang bersifat mengatur ini mengakibatkan kecenderungan bagi para ayah anak luar kawin untuk menyimpangi peraturan tersebut. Para ayah yang tidak ingin ambil bagian dalam tanggung jawabnya sebagai orang tua akan cenderung untuk mengabaikan kewajibannya untuk mengakui anak luar kawinnya. Meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya memberikan hubungan keperdataan antara ayah biologis dengan anak luar kawin, namun bagi ayah biologis yang tidak ingin bertanggung jawab kepada anak luar kawin dan ibunya akan menyimpangi peraturan ini.

Memang peraturan pengakuan lembaga anak luar kawin tidak dapat dipaksakan diberlakukannya kepada laki-laki yang merupakan ayah biologis dari anak luar kawin karena memang tidak ada peraturan yang mewajibkan atau memaksakan berlakunya peraturan ini bagi ayah biologis anak luar kawin. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi ibu dan anak luar kawin itu sendiri, karena posisi kedudukan ibu dan anak luar kawin dengan ayah biologisnya tidak seimbang. Apa yang terjadi jika si ayah tidak mau bertanggungjawab apalagi mengakui anak luar kawinnya? Tentu si ibu tidak dapat menuntut kepada ayah biologis si anak karena memang tidak ada dasar hukum yang dapat memaksa si ayah biologis untuk bertanggungjawab dan mengakui anak luar kawinnya.

Jika memang demikian, maka perlindungan hukum bagi anak termasuk di dalamnya anak luar kawin tidak dapat diwujudkan melalui peraturan-peraturan

perundang-undangan yang telah banyak dibuat oleh pemerintah dan legislatif. Sangat disayangkan apabila negara ini telah memiliki begitu banyak sarana perlindungan hukum bagi anak melalui peraturan perundang-undangan namun semua peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dipenuhi kewajibannya karena tidak memiliki alat yang dapat memaksa berlakunya peraturan perlindungan hukum bagi anak.

Padahal anak adalah penerus generasi dari bangsa ini, calon-calon pemimpin di masa depan yang berkualitas. Jika mulai dari awal perlindungan anak tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya melalui amanat undang-undang, bagaimana anak-anak di Indonesia bisa menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan? Perlindungan hukum bagi anak sangatlah penting bagi kelangsungan hidup dan pengembangan kepribadian anak, jika anak benar-benar dilindungi secara hukum maka anak akan berkembang menjadi individu yang berkualitas secara jasmani dan rohani serta menjadi pribadi yang baik.

Jika sejak kecil si anak luar kawin ini tidak mendapat pendidikan yang cukup, mendapat pemeliharaan dan pengasuhan yang seadanya karena kurangnya dukungan dari ayah biologisnya, maka si anak tersebut akan menjadi kurang berkualitas. Misalnya dari kecil si anak hanya bisa menempuh pendidikan sampai di sekolah dasar, maka pendidikan yang diterimanya itu tidak akan dapat mengantarkannya untuk bersaing dalam dunia pekerjaan dengan anak-anak yang lain yang mendapat pendidikan yang cukup. Hal ini akan berimplikasi pada tingkat pendapatan yang akan diperoleh si anak jika si anak pada masanya besok memasuki dunia kerja, lebih jauh lagi tingkat pendapatan akan berpengaruh

terhadap taraf hidupnya, kemungkinan besar dengan kurangnya pendidikan si anak akan sangat dengan kebodohan dan kemiskinan.

Pada intinya, kita telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang menjadi sarana perlindungan hukum bagi anak luar kawin, namun jangan sampai semua peraturan-peraturan tersebut hanya tinggal peraturan, jangan sampai peraturan-peraturan tersebut menjadi mubazir, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana harapan pembuat undang-undang dan pihak yang bersangkutan karena tidak adanya alat pemaksa yang dapat memaksakan keberlakuan peraturan-peraturan tersebut.

Lembaga pengakuan anak luar kawin dalam BW adalah pintu masuk untuk dapat memenuhi semua peraturan perundang-undangan terkait di dalamnya. Dengan diakuinya seorang anak luar kawin dengan ayah biologisnya, maka hak-hak anak akan terpenuhi dengan lebih mudah jika dibandingkan bila si ibunya saja yang harus memenuhi hak-hak anaknya. Namun lembaga pengakuan anak dalam BW bukan peraturan yang bersifat memaksa sehingga dapat disimpangi oleh ayah biologisnya.

Pengaturan lembaga pengakuan anak yang diatur di dalam BW memang merupakan peraturan yang bersifat mengatur, bukan bersifat memaksa. Namun peraturan yang bersifat mengatur ini bukan berarti tidak mengikat, peraturan ini tetap mengikat bagi pihak-pihak yang kepentingannya bersangkutan dengan peraturan tersebut. Memang tidak ada peraturan yang dapat memaksa si ayah untuk melakukan pengakuan anak terhadap anak luar kawinnya, namun peraturan tersebut tetap mengikat bagi ayah anak luar kawin yang ingin mengakui anak luar kawinnya.

Menurut hemat penulis, diperlukan alat yang dapat memaksa diberlakukannya lembaga pengakuan anak dalam BW untuk setiap golongan penduduk di Indonesia. Alat tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang mengandung unsur pemidanaan kepada setiap ayah biologis anak luar kawin yang tidak mau mengakui anaknya, atau dapat berupa dasar hukum yang bisa dijadikan sebagai alat untuk menuntut pertanggungjawaban ayah biologis terhadap anaknya kepada pengadilan.

1.5 Pengaturan Pengakuan Anak Luar Kawin sebagai Wujud Kepastian Hukum

Ada tiga tujuan hukum menurut para ahli seperti yang telah dijabarkan dalam bab II penelitian ini yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Aristoteles memberikan pengertian tentang keadilan, yaitu keadilan merupakan kebijakan politik, dengan aturan tersebut negara diatur dan aturan tersebut merupakan kriteria aturan yang benar.⁴ Selain itu Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua macam yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif.

Keadilan distributif adalah keadilan yang mengacu pada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, jadi yang ditekankan di sini bukanlah kesamaan namun lebih pada keseimbangan. Sedangkan keadilan korektif adalah keadilan yang mengacu pada pemberian barang dan jasa sama banyaknya kepada setiap orang tanpa mempertimbangkan kedudukan maupun kebutuhannya, jadi yang ditekankan di sini adalah kesamaan.

⁴ Ishaq. *Op Cit.* hlm. 8

Dalam kaitannya dengan keadilan, lembaga pengakuan anak luar kawin dapat menjadi salah satu sarana untuk mencapai keadilan yang bersifat distributif. Mengapa dapat dikatakan demikian? Seperti yang telah dijelaskan di atas, lembaga pengakuan anak luar kawin adalah cara bagi orang tua agar dapat memiliki hubungan keperdataan dengan anak luar kawin di mana yang sekarang berkepentingan untuk mengakui si anak adalah ayah biologisnya dengan berlakunya pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Misalnya si ayah tidak mengakui si anak meski sudah diketahui bahwa ia adalah benar-benar ayah biologis anak luar kawin tersebut, maka ada kecenderungan bagi si ayah untuk menelantarkan anaknya. Sehingga mau tidak mau tanggung jawab atas anak hanya akan dilimpahkan kepada ibu si anak saja. hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan bagi si ibu tersebut, karena ia harus bersusah payah seorang diri untuk mengasuh dan memelihara si anak, meskipun si ibu dengan senang hati membesarkan anaknya sendiri namun hal ini tentu tetap tidak adil bagi si ibu. Sedangkan si ayah dengan sesuka hatinya melepaskan tanggung jawab dari pengasuhan dan pemeliharaan anaknya.

Pada pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”, pasal tersebut memberikan tanggung jawab kepada kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya. Kedua orang tua berarti adalah ibu dan ayah. Agar keadilan bagi anak dapat tercapai, keadilan dalam hal ini adalah si anak bisa memperoleh seluruh hak-haknya, maka baik ibu maupun ayah bertanggungjawab untuk memastikan bahwa si anak harus mendapatkan hak-haknya.

Peran ayah dalam mendidik dan memelihara anak luar kawin sangatlah besar. Selain dukungan secara finansial yang diberikan oleh ayah kepada anaknya untuk perawatan dan pemeliharaan anak, yang terpenting yaitu kasih sayang, bimbingan dan kehadiran si ayah dalam kehidupan anak yang memberikan pengaruh terhadap psikologis anak. Jika anak dibesarkan oleh ibunya saja maka ia akan merasa setengah disayang oleh orang tuanya, namun jika ditambah dengan kasih sayang dan kehadiran sang ayah maka si anak akan merasa sepenuhnya disayangi dan merasa ia adalah karunia dari sebuah keluarga yang diberikan oleh Tuhan kepada kedua orang tuanya.

Dengan begitu maka si anak akan berkembang dalam suasana lingkungan yang penuh kasih sayang dan cinta. Suasana seperti itulah yang akan mempengaruhi perkembangan kepribadian si anak, jika suasana di atas terjadi dalam perkembangan anak maka si anak akan menjadi pribadi yang baik, tidak pendendam yang penyayang.

Dengan diberlakukannya lembaga pengakuan anak yang diatur dalam BW, diharapkan keadilan bagi si ibu dan anak luar kawin bisa tercapai karena dengan begitu si ayah yang ingin mengakui anak luar kawinnya bisa mengakuinya melalui lembaga pengakuan anak. Sehingga meskipun tidak terikat perkawinan, si ibu dan ayah anak luar kawin dapat membagi tanggung jawab secara adil untuk mengasuh dan memelihara si anak tersebut.

Dengan kaitannya dengan salah satu tujuan hukum yaitu kemanfaatan, lembaga pengakuan anak luar kawin yang diatur dalam BW bisa menjadi sarana untuk mencapai kemanfaatan bagi anak luar kawin itu sendiri. Jeremy Bentham memberikan pendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan

kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya umat manusia (*the greatest happiness for the greatest number*).⁵

Dengan diberlakukannya pengaturan lembaga pengakuan anak luar kawin yang ada dalam BW, maka ayah biologis anak luar kawin memiliki sarana untuk bisa memiliki hubungan keperdataan dengan anak luar kawinnya. Dengan demikian kita dapat membayangkan betapa besar kemanfaatan yang didapat oleh si anak luar kawin dan ibunya. Si ayah dapat bersama-sama dengan ibu anak luar kawin tersebut untuk mengasuh dan memelihara si anaknya.

Jika si ayah mengakui anak luar kawinnya, maka kehidupan si anak dapat menjadi lebih baik dari segi perawatannya, si anak bisa terjamin papan, sandang dan pangannya lebih baik karena memiliki dua kepala yang merawatnya. Meskipun terkadang kondisi ekonomi kedua orang tuanya tidak begitu baik, namun setidaknya bagi si ibu akan lebih meringankan beban daripada jika harus merawat si anak seorang diri.

Dengan kaitannya dengan kepastian hukum, lembaga pengakuan anak luar kawin yang diatur dalam BW adalah salah satu sarana alternatif yang menjamin kepastian hukum bagi pemenuhan hak-hak anak luar kawin. Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 /PUU-VIII/2010 memutuskan bahwa anak luar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau teknologi.

Namun, dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidaklah cukup untuk menjamin kepastian hukum tentang status antara hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Hal itu dikarenakan

⁵ Ishaq. *Op Cit.* hlm. 8

tidak ada tindak lanjut setelah putusan tersebut dikeluarkan. Kekosongan hukum yang disebabkan oleh tidak adanya tindak lanjut pasca putusan tersebut menyebabkan tidak ada kepastian hukum tentang hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Sedangkan ayah biologis anak luar kawin tetap harus melakukan pengakuan terhadap si anak agar memiliki hubungan keperdataan dengan si anak.

Jadi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 /PUU-VIII/2010, agar tidak terjadi perdebatan dan kerancuan dalam kepastian hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayahnya, pemerintah dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengamanatkan agar pengaturan pengakuan anak luar kawin dalam BW dapat diterapkan bagi seluruh warga Negara Indonesia tanpa memperhatikan golongan penduduk.

Dengan berlakunya lembaga pengakuan anak yang diatur dalam BW bagi semua golongan penduduk yang ada di Indonesia ini, maka diharapkan tujuan hukum akan kepastian hukum dapat dicapai. Pengakuan yang dilakukan ayah biologis anak luar kawin terhadap anaknya dapat menjamin hak-hak si anak dalam status kependudukan, status ahli waris dan kedudukan anak dalam hak alimentasi.

Namun berlakunya pengaturan pengakuan anak luar kawin yang terdapat di dalam BW juga memiliki kekurangan. Salah satunya yaitu sifat kepengaturannya yang bersifat mengatur saja (*anfullen recht*) sehingga masih dapat disimpangi oleh ayah-ayah anak luar kawin yang ingin melepaskan tanggung jawab terhadap anak luar kawinnya. Mungkin ke depan diperlukan instrument hukum yang dapat mewajibkan ayah anak luar kawin melakukan

pengakuan yang bertanggungjawab terhadap anak luar kawinnya dengan harapan tidak ada lagi anak luar kawin yang terlantar.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, dengan adanya pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka si ibu tidak perlu lagi melakukan pengakuan terhadap si anak karena telah otomatis timbul hubungan perdata dengan anaknya. Tapi bagi si ayah, si ayah tetap harus melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut.

Karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur tentang pengakuan anak luar kawin dan tidak mengatur hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, maka menurut penulis ketentuan yang mengatur tentang pengakuan anak luar kawin dalam BW dapat diterapkan untuk semua golongan penduduk di Indonesia untuk melakukan pengakuan terhadap seorang anak luar kawin. Pemakaian aturan pengakuan anak luar kawin dalam BW adalah tepat untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak diaturnya pengakuan anak luar kawin dalam Undang-undang Perkawinan dan dipakainya ketentuan ini tidak bertentangan dengan Pasal 43 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Selain itu pemakaian ketentuan pengakuan anak luar kawin dalam BW juga dapat bersifat sementara untuk mengisi kekosongan hukum sambil menunggu pembuat undang-undang merevisi ketentuan hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayahnya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Pemakaian pengaturan pengakuan anak luar kawin dalam BW juga diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum tentang hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya sehingga dengan begitu si ayah biologis tersebut memiliki kewajiban hukum terhadap anaknya untuk memenuhi hak-hak anak luar kawinnya terutama hak memperoleh pemeliharaan dan pengasuhan serta hak memperoleh pendidikan.

5.2 Saran

Dari serangkaian hasil penulisan di atas, penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin berguna bagi siapapun yang bersangkutan dengan permasalahan pengakuan anak luar kawin, adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Agar pemerintah dan lembaga yang terkait segera memperbaiki Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terutama yang berhubungan dengan hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya sesuai dengan acuan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 agar si anak dapat mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayahnya juga.
2. Dalam rangka unifikasi hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi anak luar kawin, maka sebaiknya perlu dipertimbangkan pembentukan lembaga pengakuan anak luar kawin guna menaikkan harkat dan martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Darwan Prinst, **Hukum Anak Indonesia**, PT Citra Aditnya Bakti, Bandung, 1997
- Ishaq, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- J Satrio, **Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Komaruddin, **Metode Penulisan Skripsi dan Tesis**, Penerbit Angkasa, Bandung, 1982.
- Lemaire dalam Pipin Syarifin, **Pengantar Ilmu Hukum**, Pustaka Setia, Bandung, 1998.
- Lili Rasjidi, **Dasar-dasar Filsafat Hukum**, Penerbit Alumni, Bandung, 1985.
- Maruarar Siahaan, **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta 2012.
- Mokhammad Najib dan Soimin, **Pengantar Hukum Indonesia**, Setara Press, Malang, 2012.
- Oemarsalim, **Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Otje Salman, **Ikhtisar Filsafat Hukum**, Armico, Bandung, 1987.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum Edisi Revisi**, Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- Philipus M Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Roscoe Pound, **Pengantar Filsafat Hukum**, Bhartara Karya Aksara, Jakarta, 1982.

Sajuti Thalib, **Hukum Kewarisan Islam di Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Samidjo, **Pengantar Hukum Indonesia**, Armico, Bandung, 1985.

Santhos Wachjoe Prijambodo, **Bunga Rampai Hukum dan Filsafat di Indonesia**, Deepublish, Yogyakarta, 2014.

Soedharyo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 1990.

Soemitro dan Ronny Hanitijo, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Subekti, **Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris**, PT Intermasa, Jakarta, 2005.

Völmar, **Pengantar Studi Hukum Perdata**, Rajawali, Jakarta, 1983.

Wahyu Sasongko, **Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen**, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.

Wiryo Prodjodikoro, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Sumur Bandung, Bandung, 1984.

Zainudin Ali, **Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2011. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Internet:

J Amelisa Juliana. **Tinjauan Yuridis Tentang Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.**
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=80967&val=4116>
(Diakses pada tanggal 5 November 2015)

Mercilita M. Mema **Analisis Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hak Mewaris Anak Diluar Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan**, Lex Privatum Vol. II/No.2/April/2014.
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/4530>.
(Diakses pada tanggal 5 September 2015 Pukul 20.40 WIB)

Ferdy T Titah, **Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil Undang-undang Perkawinan.** Lex Administratum, Vol. II/No.1/Jan-Mar/2014.
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/3941/3453>
(Diakses pada tanggal 5 November 2015)